

# Moral dan Politik

Otto Gusti\*

Media Indonesia, 13 Mei 2019

<https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/235163/moral-dan-politik>

“Bernafsu membentuk pansus yang notabene menegasikan *rule of the game* yang mereka buat ialah tabiat amat buruk dalam berkontestasi” (MI, 11/5/2019). Awasan kritis Editorial Media Indonesia ini ditujukan kepada para anggota DPR pendukung pasangan Prabowo-Sandi, PKS dan Gerindra, yang tengah menggalang Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pemilu 2019.

Peringatan ini tepat sebab Pansus tersebut tidak berpijak pada basis argumentasi yang kokoh secara demokratis. Sistem demokrasi kita sesungguhnya sudah menyediakan sejumlah perangkat hukum untuk menyelesaikan setiap konflik dan sengketa dalam Pemilu.

Bawaslu mendapat mandat hukum untuk menerima pengaduan dari para kontestan yang merasa dirugikan terkait proses pemilu. Sementara itu kecurangan dalam hasil pemilu dapat dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Ketika lembaga-lembaga demokrasi ini bekerja dengan baik, pengerahan massa atau *people power* sesungguhnya menjadi tidak relevan.

## Kelompok Para Bandit

Demokrasi yang berkualitas membutuhkan sikap sportif dan taat pada *rule of the game* yakni perangkat regulasi yang berlaku. Sportivitas ditunjukkan dalam sikap legowo untuk menerima kekalahan dan mengakui keunggulan lawan dalam kontestasi.

Tanpa kepatuhan pada *rule of the game* demokrasi yang berkualitas tak mungkin bersemi dan politik yang beradab tak dapat dibangun. Tanpa aturan hukum negara tidak mungkin ada dan kehidupan bersama diwarnai kesewenang-wenangan. Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, tatanan sosial akan berubah menjadi apa yang dilukiskan oleh Thomas Hobbes sebagai kondisi “*bellum omnium contra omnes*” – “Perang semua melawan semua”.

Tanpa hukum yang berpijak pada moralitas yang rasional seperti prinsip kebebasan, kesetaraan dan keadilan sosial, komunitas politik tak lebih dari ruang pertarungan perebutan kuasa semata.

Tentang ini pada abad ke-5 M, Aurelius Agustinus (354-430) pernah berujar: “Kerajaan-kerajaan tanpa keadilan apa itu selain gerombolan-gerombolan perampok? Oleh karena itu halus dan benar jawaban yang diberikan oleh seorang perampok laut kepada Iskandar Agung, sewaktu sang raja bertanya bagaimana dia itu sampai berani membuat laut menjadi tidak aman. Maka orang itu dengan bangga dan terbuka mengatakan: ‘Dan bagaimana engkau sampai berani membuat seluruh bumi menjadi tak aman? Memang, aku dengan perahu kecilku disebut perampok, tetapi engkau dengan angkatan laut besar disebut panglima yang jaya’” (F. Magnis Suseno, 1999, hlm. 193).

Menurut Agustinus, negara tanpa keadilan tak lebih dari kelompok para bandit atau perampok yang mungkin memiliki kedaulatan atas wilayah tertentu, tapi kekuasaannya dipandang sebagai illegitim. Satu-satunya yang mengangkat martabat negara dari gerombolan para bandit adalah sejauh mana negara bertekad untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya.

### **Legitimasi Moral**

Prinsip keadilan sosial adalah basis legitimasi etis atas pertanyaan tentang alasan mengapa negara yang ada secara konkret itu harus diakui, diterima dan “berhak mendapat ketundukan dari para warganya” (Ignas Kleden, 2004).

Dalam kerangka legitimasi moral tersebut sejumlah pertanyaan berikut seputar kekuasaan dapat dielaborasi secara rasional. Apakah dasar legitimasi bahwa manusia boleh menguasai manusia lain? Apakah dapat diterima bahwa manusia sebagai pribadi bebas tunduk di bawah paksaan institusi, aturan-aturan abstrak serta birokrasi tanpa jiwa? Apakah demi pragmatisme pembangunan ekonomi orang-orang miskin boleh digusur dari tempat tinggalnya?

Legitimasi moral bermula dari konsep hukum kodrat yang dicetuskan oleh Aristoteles dan para filsuf Stoa dan kemudian dikembangkan oleh Cicero, Agustinus, Thomas Aquinas, Francisco Suarez, Hugo Grotius dan Christian Wolff. Mereka memandang negara dan tatanan hukumnya sebagai sarana menciptakan keadilan. Sumber legitimasi negara adalah moralitas yang berlaku universal. Negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Ia hanya ditaati sejauh menjalankan fungsinya dalam batas-batas moral tertentu.

Legitimasi moral penyelenggaraan kekuasaan membatalkan prinsip pertarungan kuasa telanjang Hobbesian yang berpijak pada adagium hukum: *Auctoritas, non veritas facit legem* – Otoritas dan bukan kebenaran yang menciptakan hukum.

Hari-hari ini narasi Hobbesian bertaburan di ruang publik politik Indonesia yang diungkapkan lewat diksi pansus, *people power*, makar dan kecurangan pemilu. Sejumlah berita bohong sengaja diproduksi untuk mendelegitimasi proses pemilu yang sudah berjalan baik dan mendapat apresiasi dari dunia internasional.

Kegaduhan ini sesungguhnya hanya terjadi pada level elit politik yang haus kuasa dan telah mengabaikan akal sehat dan nurani bening 150 juta pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.

### **Politik**

Narasi Hobbesian yang mengotori ruang publik politik harus dilawan dengan wacana tentang politik yang sesungguhnya. Menurut Hannah Arendt (1906-1975), politik adalah ungkapan kebebasan. Dan kebebasan mengandaikan kehadiran dan pengakuan yang lain sebagai pribadi unik. Keunikan setiap pribadi merupakan dasar pluralitas sebagai titik tolak politik.

Pluralitas sebagai syarat politik terungkap lewat proses persetujuan, kritik, penolakan dan kerja sama. Keseluruhan proses ini terjadi dalam komunikasi. Maka politik adalah wicara atau diskursus rasional bebas represi.

Ketika politik menjadi lahan mata pencaharian, maka wicara macet dan politik pun dikuburkan. Sebab di sana terjadi dominasi “orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi” (Haryatmoko, 2003). Politik sebagai sumber mata pencaharian memperlakukan ruang

publik sebagai pasar yang marak KKN, propaganda, kebohongan, iklan politik dengan penekanan pada penampilan luar, manipulasi, pengerahan massa dan politik partisan.

Bagi Arendt, ruang publik yang sudah direduksi kepada sistem pasar adalah bukti bahwa politik sudah kehilangan esensinya yakni kebebasan. Dalam kondisi ini warga negara direduksi menjadi konsumen yang tunduk pada imperatif kerja dan karya.

Kerja merupakan jawaban manusia atas tuntutan hidup. Pada tataran ini manusia sama dengan binatang (*animal laborans*). Ia memusatkan diri pada hidupnya sendiri, tubuh dan kodrat biologisnya.

Lewat karya (*herstellen*) manusia menciptakan alat-alat yang membuatnya mampu menguasai alam sehingga ia bebas dari ketergantungan binatang. Manusia bekerja dan mulai mengubah dunia menjadi habitatnya (*homo faber*). Di sini manusia membutuhkan orang lain, tapi hanya sebagai alat yang membantu kelancaran kerjanya.

Politik perlu dikembalikan ke kodratnya yakni dialog langsung antarmanusia. Politik terwujud dalam komunikasi antarwarga yang bebas dan egaliter. Akan tetapi sebuah komunikasi hanya mungkin jika ada macam-macam manusia.

Jika hanya ada satu manusia di puncak piramida kekuasaan dan yang lain tidak lebih dari massa yang tidak tahu apa-apa, maka di sana tidak ada politik. “*Sang* Manusia itu apolitis. Politik berlangsung di antara manusia-manusia, maka politik berada di luar manusia. Karena itu tak ada substansi politis” (Arendt, 2003).

Politik dibangun ketika manusia berbicara, berkomunikasi dan membangun wacana. Komunikasi mengandaikan faktum pluralitas manusia. Jika manusia semuanya seragam, maka tidak terjadi dialog dan tidak ada politik.

Komunikasi berujung pada terbentuknya komunitas politik. Karena itu Aristoteles benar ketika ia mendefinisikan manusia sebagai *zoon politikon* atau makhluk sosial. Secara kodrati manusia adalah makhluk berpolitik. Artinya, perwujudan diri manusia hanya mungkin dilakukan dalam *polis* atau komunitas politik. “Sebagaimana setiap kemungkinan mencapai pemenuhannya ketika mencapai tujuannya, demikianpun dengan manusia, ia hanya dapat mewujudkan kemungkinan-kemungkinan yang dimilikinya secara kodrati dalam *polis*. *Polis* adalah aktualisasi dari potensi khusus manusia” (Aristotelse, 1994).

Tujuan negara adalah merealisasikan kebaikan tertinggi dan hidup bahagia untuk semua warga yang bebas. *Polis* sebagai komunitas warga yang bebas dan egaliter melayani kepentingan semua. Bagi bangsa Indonesia, tujuan mulia ini hanya dapat dicapai jika seluruh proses politik berjalan atas dasar etika Pancasila.

Proses demokratisasi yang ditapaki bangsa Indonesia sejak masa reformasi cenderung terperangkap dalam demokrasi prosedural minus kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Pancasila dapat menjadi basis normatif dan identitas kolektif dalam membangun Indonesia sebagai sebuah tatanan politis yang demokratis.

\* Dosen Filsafat dan HAM di STFK Ledalero, Maumere, Flores, NTT; alumnus program doktoral di Hochschule für Philosophie, München, Jerman.

